

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH PENELITIAN

Sejarah panjang Indonesia tentunya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan perempuan dan laki-laki, mereka bersama-sama berjuang untuk membangun Indonesia menuju titik kemajuan. Namun, ketika peran kaum perempuan dituliskan dalam sejarah hal itu ternyata berbeda, baik dari segi kuantitas maupun perhatian sejarawan untuk membahas mengenai sejarah perempuan. Hal inilah yang membuat penulisan sejarah perempuan di Indonesia masih tertinggal dari ilmu-ilmu sosial – terutama kajian tentang *women studies* (Kuntowijoyo, 2003: 113). Perbedaan tersebut bisa jadi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu dari sejarawan maupun paradigma yang berkembang mengenai perempuan dan laki-laki.

Lebih jauh Siti Fatimah mengungkapkan beberapa alasan mengapa penulisan sejarah perempuan di Indonesia tergolong lambat apabila dibandingkan dengan ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi. *Pertama*, adanya paradigma yang keliru tentang sejarah perempuan, banyak pendapat yang menganggap masalah perempuan itu ranah domestik. Sementara urusan keilmuan merupakan ranah publik yang identik dengan dunia pria. *Kedua*, dari segi metodologi yaitu adanya perspektif yang keliru tentang dunia perempuan berpengaruh kepada faktor lainnya yakni persoalan metodologi dan sumber. Oleh karena urusan perempuan dianggap prihat, sedangkan sebagian besar dokumen berurusan dengan ranah publik, maka tidak tertutup kemungkinan, perempuan luput dan terabaikan dari catatan sejarah (Fatimah, 2008: 385-386).

Posisi sejarah yang mengkaji perempuan khususnya di Indonesia, belum mendapatkan keberimbangan secara kuantitas maupun kualitas dibandingkan dengan penulisan sejarah Indonesia yang lebih fokus kepada laki-laki. Minimnya perhatian untuk memunculkan peran tokoh perempuan dalam sejarah Indonesia bukan karena keterbatasan, kemampuan atau perhatian, tetapi karena memang ada upaya sengaja untuk mengucilkan kaum perempuan (Ritzer dan Goodman, 2010:

404). Hal tersebut terlihat dari masih minimnya tulisan sejarah yang mengangkat tokoh-tokoh perempuan serta masih sedikitnya tulisan yang menggambarkan peran politik dari seorang tokoh perempuan.

Selain adanya upaya-upaya untuk mengesampingkan kaum perempuan, perlu diperhatikan juga dari berbagai judul karangan, judul seminar dan makalah, ketika membahas mengenai perempuan selalu memakai kata “peranan” sebagai tema pokoknya, seakan-akan perempuan hanya penyumbang terhadap jalannya sektor-sektor sosial dan ekonomi (Kuntowijoyo, 2003: 114). Padahal, tidak hanya dalam urusan dapur (domestik) saja perempuan mempunyai peran, perempuan pun mengambil bagian untuk berperang dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia serta mengisi ruang-ruang publik yang didominasi laki-laki. Keadaan tersebut dapat terjadi karena dari masing-masing individu perempuan maupun laki-laki.

Problematika perempuan untuk dihadirkan dalam tulisan sejarah tidak sepenuhnya luput dari perhatian para sejarawan. Karena sebenarnya sudah banyak tulisan sejarah dari perempuan yang dihadirkan, seperti tulisan tentang tokoh Ken Dedes, Tribhuwanatunggadewi, Sultanah Seri Ratu Alam Safiatun, R.A. Kartini, Dewi Sartika, Maria Walanda, Cut Nyak Din, Cut Mutia, Matha Christina Tiahahu, S.K. Trimurti, B.M. Diah, dan tokoh perempuan lainnya (Kuntowijoyo, 2003: 121; Winarti, 2007: 257). Walaupun begitu, terkadang masyarakat masih terpaku pada tokoh-tokoh yang sering diperbincangkan, diluar itu kita mengalami kesulitan untuk mengakses sumber-sumbernya.

Apa yang dialami kaum perempuan dalam tulisan sejarah di Indonesia ternyata sulit untuk dihindari dan harus disikapi secara kritis dengan analisis yang tajam, meskipun terkadang perempuan ditampilkan dalam sejarah namun tidak lebih sebagai “pelengkap” yang “dikonstruksikan” dalam budaya patriarkhis yang selalu memihak laki-laki dan untuk kepentingan laki-laki. Kalau kita telaah perjalanan perempuan ketika Indonesia mengalami perang kemerdekaan, menempatkan sosok perempuan terlibat perannya hanya di dalam dapur umum saja (Fatimah, 2008: 384). Rupanya diskusi antara laki-laki dan perempuan, baik untuk menuntut persamaan hak maupun urusan lainnya sudah terlihat jauh

sebelumnya, seperti yang diungkapkan Ir. Sukarno dalam buku “Di Bawah Bendera Revolusi” bahwa :

“Kaum perempuan tidak tujukup dengan mengedjar dan mendapat persamaan hak dengan laki-laki sahaja. Kaum laki-laki boleh djadi pegawai paberik, berpolitik, mendjadi advocaat, mendjadi guru, mendjadi anggauta parlemen, kenapa kaum perempuan tidak” (1965: 246).

Keadaan yang dialami kaum perempuan dalam literatur sejarah rupanya juga terjadi dalam sosok Supeni. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya tulisan sejarah untuk menampilkan peran Supeni dalam bidang politik, sedikitnya tulisan yang mengangkat peran Supeni dalam bidang politik bukan tanpa dasar dan alasan. “Sejak tahun 1997, lebih dari 1.700 buku sejarah Indonesia diterbitkan, dari sekian banyak itu hanya 2 persen saja yang membahas dan menyinggung masalah perempuan” (Fatimah, 2008: 387). Itu artinya, hanya sekitar 34 judul buku sejarah yang secara spesifik membahas perempuan, dan tidak lebih dari lima judul buku yang mengulas peran-peran Supeni, itupun dengan kadar pembahasan yang bervariasi.

Perhatian untuk menuliskan peranan Supeni rupanya tidaklah mudah, karena masih timbul perdebatan mengenai siapa yang berhak menuliskan sejarah perempuan. Akan tetapi, siapapun orangnya mempunyai hak untuk menulis sejarah perempuan dengan menitikberatkan akan keberadaan perempuan yang selanjutnya ditempatkan pada porsi yang wajar dalam perjalanan umat manusia (Winarti, 2007: 258). Maka dari itu, untuk mencapai keberimbangan dalam penulisan sejarah serta memunculkan peran-peran Supeni, dibutuhkan perhatian khusus baik oleh sejarawan laki-laki maupun sejarawan perempuan itu sendiri serta diperlukan upaya nyata untuk memunculkan kembali tokoh perempuan baik dari kalangan elite maupun dari kalangan biasa.

Sebagai catatan ketika Indonesia memasuki periode awal kemerdekaan tahun 1945, sosok Supeni berperan aktif disetiap perjalanan pergerakan organisasi perempuan Indonesia, dimana beliau menjadi Ketua Kongres Wanita Indonesia ke-IV yang diselenggarakan di Solo dari 26-28 Agustus 1948. Hasil dari kongres tersebut ialah dibentuknya badan untuk memeriksa pergantian undang-undang

perkawinan, mengatasi masalah yang berhubungan dengan permintaan atas perempuan pekerja, dan penelitian tentang kesehatan masyarakat. Selain itu, peserta kongres menyetujui dasar aktivitas organisasi mereka pada lima prinsip dasar Pancasila (Stuers, 2008: 177-178).

Perjuangan dan peran Supeni tidak berhenti sampai disitu, beliau kemudian menyelenggarakan kongres berikutnya pada 26 Agustus sampai 2 September 1949 di Yogyakarta, padahal beberapa bulan sebelumnya Yogyakarta mendapat serangan dari pasukan Belanda. Namun, Supeni dan organisasi perempuan yang menaunginya mampu melewati masa sulit, berlangsungnya konferensi tersebut terbilang sukses dengan dihadiri oleh berbagai delegasi organisasi perempuan dari dua wilayah yang bebas atau wilayah yang masih diduduki Belanda. Walaupun Supeni memberikan peran yang cukup besar dalam organisasi Kowani, namun ada hal yang menjadi pertanyaan besar dimana namanya tidak tercantum pada halaman “sejarah singkat” (*brief history*) dalam situs *web* milik Kowani (www.kowani.or.id), situs *web* tersebut pun tidak merinci kehidupan pergerakan kaum perempuan pada periode 1946-1950 (Tn. [online], 2004).

Selain perannya dalam Kowani, Supeni juga aktif dalam partai politik serta terlibat dalam persiapan untuk menyelenggarakan pemilihan umum pertama kalinya pada tanggal 29-30 September 1955. Supeni bersama Partai Nasional Indonesia aktif menyusun Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum dan setelah undang-undang disahkan, Supeni ditunjuk menjadi ketua Panitia Pemilihan Daerah Jakarta Raya dan sebagai ketua Badan Pekerja Panitia Aksi Pemilihan Umum PNI (Tista, 1989: 53). Pemilu pertama kali ini dianggap sebagai pemilihan umum yang paling jujur dan adil dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia. Setelah pemilihan umum untuk DPR, disusul memilih anggota-anggota konstituante, dalam pemilihan ini Supeni terpilih sebagai anggota DPR dan Konstituante dari PNI (Richmanto [online], 2011). Tugas dari konstituante ialah menyusun konstitusi untuk Negara Republik Indonesia, UUD 1945 dan UUD Peralihan yang berlaku, Supeni sebagai anggota bersama-sama dengan dr. A.K.

Gani, Ki Mangunsarkoro, Subagio Reksodipuro dan Lukman Hakim (Tista, 1989: 55).

Antara tahun 1949 sampai tahun 1966, karir dan peran Supeni dalam bidang politik mengalami masa puncaknya. Sebagai catatan tahun 1960 Supeni diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintahan Amerika Serikat walaupun pada akhirnya jabatan tersebut dibatalkan. Selanjutnya di tahun 1961, Supeni menjadi Duta Besar Keliling Republik Indonesia sekaligus Pembantu Menteri Luar Negeri Urusan PBB dan organisasi-organisasi internasional, Supeni ditugaskan Presiden Sukarno untuk menemui pimpinan negara-negara Non Blok guna mensukseskan jalannya Konferensi Tingkat Tinggi Non Blok di Beograd (Museum KAA [Brosur], 2011). Supeni juga memperjuangkan kembalinya Irian Barat ke pangkuan Indonesia melalui Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 dan Sidang Umum DK PBB, berkat kegigihannya ia dijuluki "*The Irian Lady*" (Tn. [online], 2004; Tista, 1989: 138).

Memasuki tahun 1962, Presiden Sukarno menugaskan Menteri Luar Negeri Subandrio untuk mempersiapkan Konferensi Asia-Afrika yang ke II. Subandrio menyarankan Supeni yang mempersiapkannya karena pada saat itu Supeni berposisi sebagai Pembantu Menteri Luar Negeri urusan PBB dan organisasi-organisasi internasional. Akan tetapi, kenyataan lain harus ia terima, Subandrio mengatakan bahwa untuk mempersiapkan konferensi tersebut bukan tugas Supeni, melainkan wewenang Pembantu Menteri Luar Negeri urusan politik, Suwito Kusumo Widagdo (Tista, 1989: 213). Dan karena ada sesuatu hal pelaksanaan Konferensi Asia-Afrika ke-II yang sedianya dilaksanakan tahun 1965 di Aljazair mengalami penundaan.

Pada masa pemerintahan Presiden Sukarno pula banyak bermunculan organisasi perempuan dengan corak gerakannya yang masih khas. Akan tetapi, ketika memasuki penghujung pemerintahan Orde Lama, gerakan perempuan mengalami penghancuran secara ideologi dan politiknya sejak pecahnya Peristiwa 30 September 1965 melalui propaganda militer terhadap Gerwani yang dituduh membunuh enam jenderal dan seorang perwira menengah (Stuers, 2008: x).

Dalam hal ini Supeni juga mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan melalui berbagai teror, karena beliau dianggap terlibat dalam peristiwa tersebut.

Memasuki masa transisi dari pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru, gerakan perempuan mengalami titik lemah, begitu juga dengan Supeni. Perannya dalam politik dalam negeri mulai terpinggirkan ketika penghabisan pemerintahan Presiden Sukarno dan ketika memasuki awal tahun 1970, ditandai dengan konflik yang terjadi dalam tubuh partai serta karena Supeni dianggap sebagai orang yang dekat dengan pemerintahan sebelumnya. Walaupun begitu, karir politik Supeni sebenarnya belumlah selesai, namun memang semenjak berkuasanya Orde Baru dan perpecahan yang terjadi dalam tubuh Partai Nasional Indonesia membuatnya tidak lagi diperhitungkan dalam percaturan politik Indonesia. Supeni dipinggirkan oleh kekuatan mainstream PNI yang pro Orde Baru karena dianggap dekat dengan PNI Ali-Surahman yang Sukarno dan kiri (Darmayana [online], 28 Februari 2012). Dinamika perjuangan dan peran Supeni dalam sejarah Indonesia, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul *“Peranan Supeni Dalam Bidang Politik Tahun 1945-1970”*.

1.2 RUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang disampaikan di atas, peneliti melihat ternyata masih sedikit tulisan sejarah yang menampilkan peran Supeni dalam organisasi politik di dalam perjalanan sejarah nasional pada kurun waktu tahun 1945-1970. Pembahasan dibagi ke dalam tiga rumusan pertanyaan penelitian yang saling berkaitan, penyusunan pertanyaan penelitian dimaksudkan untuk mengarahkan pembahasan dan proses penelitian yang dilakukan. Ketiga pertanyaan penelitian tersebut ialah:

1. Apakah yang Melatarbelakangi Supeni Terlibat dalam Kegiatan Politik Di Indonesia?
2. Bagaimana Keterlibatan Supeni dalam Kegiatan Organisasi Politik?
3. Bagaimana Dampak Keterlibatan Supeni dalam Politik Terhadap Perkembangan Politik di Indonesia?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai peneliti setelah semua proses penelitian dilakukan, rumusan tujuan penelitian didasarkan atas pokok pikiran rumusan masalah yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan penelitian, semua itu digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang sudah dirumuskan merupakan tujuan utama yang hendak dicapai oleh peneliti. Selain itu, ada beberapa tujuan umum dari penelitian yang telah peneliti tetapkan, yaitu :

1. Menganalisis perjalanan hidup dan awal keterlibatan Supeni dalam organisasi yang berbasis politik, baik itu organisasi perempuan maupun partai politik di Indonesia.
2. Menggambarkan peran-peran Supeni dalam organisasi perempuan baik Kowani maupun Perwari, digambarkan juga dinamika kehidupan organisasi perempuan yang terjadi pada saat itu.
3. Mendeskripsikan peran Supeni dalam tubuh partai politik, terutama pada Partai Nasional Indonesia serta peran lainnya seperti dalam politik internasional.
4. Mendeskripsikan dampak atau pengaruh politik bagi Indonesia yang terjadi akibat keterlibatan Supeni dalam bidang politik, terutama pada kurun waktu 1945-1965 dan tahun 1966-1970.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian mengenai tulisan sejarah yang mengangkat peran-peran Supeni dalam organisasi perempuan maupun partai politik yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah nasional terutama dalam kurun tahun 1945-1970, diharapkan bermanfaat dan dapat dikembangkan, antara lain:

1. Bagi peneliti, dapat menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk aplikasi pengalaman dan teori yang telah didapatkan selama mengikuti proses pendidikan di Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI.

2. Memberikan edukasi kepada masyarakat baik yang peduli dengan sejarah maupun masyarakat yang berminat pada ilmu dan peristiwa sejarah, bahwa masih banyak tokoh perempuan yang perlu digali dan dikembangkan kembali sehingga memiliki posisi yang sama dalam penulisan sejarah di Indonesia.
3. Menanamkan nilai-nilai sejarah kepada peserta didik dalam konteks membangun kesadaran sejarah yaitu dengan memunculkan kembali tokoh-tokoh perempuan di Indonesia yang masih atau belum diungkapkan secara utuh.
4. Memperluas kajian mengenai tokoh perempuan dalam sejarah di Indonesia, sehingga diharapkan diskusi mengenai perempuan di Indonesia semakin beragam.
5. Sebagai bahan pengembangan materi dan diskusi khususnya mengenai sejarah perempuan di Indonesia pada lingkungan Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI.

1.5 METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

1.5.1 Metode Penelitian

Untuk menuju penelitian dan penulisan yang dapat dipertanggungjawabkan diperlukan suatu metode penelitian yang telah disepakati dan disesuaikan dengan jalur yang dipilih oleh peneliti, dalam hal ini metode penelitian yang digunakan peneliti ialah metode sejarah melalui pendekatan interdisipliner, hal ini dilakukan agar permasalahan terlihat secara menyeluruh dan utuh. Menurut Edson (Supardan, 2007: 306) metode historis ialah metode penelitian yang digunakan untuk *“...menggambarkan permasalahan atau pertanyaan untuk diselidiki; mencari sumber tentang fakta historis; meringkas dan mengevaluasi sumber-sumber historis; dan menyajikan fakta-fakta yang bersangkutan dalam kerangka interpretatif”*.

Lebih jauh Louis Gottschalk (1969: 32) mengungkapkan bahwa metode historis adalah proses pengujian dan analisis secara kritis terhadap rekaman serta

peninggalan masa lampau dan menuliskan hasilnya berdasarkan fakta yang telah diperoleh yang terdapat dalam historiografi.

Di sisi lain pendekatan interdisipliner merupakan pendekatan yang menggunakan disiplin ilmu sosial secara berimbang, tanpa ada yang dominan. Oleh karena itu, penelitian ini memerlukan alat bantu atau *auxiliary sciences* atau *sister disciplines* (Sjamsuddin, 2007: 240), yaitu sosiologi dan ilmu politik. Peranan ilmu bantu dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Sosiologi, konsep sosiologi digunakan untuk menjelaskan mengenai dinamika sosial. Penelitian ini menyoroti bagaimana pandangan kelompok gender terhadap kondisi Supeni yang teralienasikan dalam penulisan sejarah di Indonesia dan organisasi perempuan yang dipimpinnya menghadapi masa perang kemerdekaan.
- b. Politik, bahasan utama penelitian ini adalah mengenai perjuangan Supeni dalam kehidupan politik di Indonesia. Maka pendekatan politik harus digunakan untuk melihat kedudukan Supeni dalam politik di Indonesia, bagaimana peran Supeni terhadap perubahan politik Indonesia. Selain itu, partisipasi wanita dalam bidang politik merupakan konsep yang harus dianalisis sebagai pengembangan melihat kehidupan Supeni dalam bidang politik.

Sejarawan Kuntowijoyo (2005: 90) memperjelas mengenai penelitian sejarah yang mempunyai lima tahap, yaitu: pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi (kritik sejarah dan keabsahan sumber), interpretasi: analisis dan sintesis, dan yang terakhir ialah historiografi. Adapun langkah-langkah penelitian ini mengacu pada proses metodologi penelitian sejarah, yang mengandung empat langkah penting.

- a. *Heuristik*, merupakan sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, atau mencari materi sejarah atau evidensi sejarah (Sjamsuddin, 2007: 86). Dalam proses mencari sumber-sumber ini, peneliti mengunjungi beberapa perpustakaan, seperti Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia Jln. Dr. Setiabudhi No. 229, Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Padjajaran Jln. Raya Bandung-

Sumedang Km. 21. Selain itu, peneliti juga mencari di toko buku, browsing internet serta berusaha mencari tulisan-tulisan yang sejaman dalam surat kabar dan berkaitan dengan inti bahasan penelitian.

- b. *Kritik*, sumber-sumber sejarah yang ditemukan diteliti lebih lanjut baik itu konten tulisan maupun bentuknya yaitu dilakukannya kritik internal dan eksternal. Kritik internal dilakukan peneliti untuk melihat kelayakan konten dari sumber-sumber yang telah didapatkan untuk selanjutnya dijadikan bahan untuk penelitian dan penulisan skripsi.
- c. *Interpretasi*, peneliti memberikan penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan selama penelitian berlangsung. Dalam tahap ini, peneliti membuat deskripsi, analisis kritis serta pemilihan fakta-fakta. Kegiatan penafsiran dilakukan dengan jalan menafsirkan fakta dan data dengan konsep dan teori yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Peneliti juga memberikan makna terhadap fakta dan data kemudian disusun, ditafsirkan dan dikorelasikan satu dengan lainnya. Fakta dan data yang telah diseleksi dan ditafsirkan menjadi ide pokok sebagai kerangka dasar penelitian, dalam kegiatan ini peneliti memberikan penekanan penafsiran terhadap fakta dan data yang diperoleh dari sumber-sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan penulisan sejarah wanita tentang tokoh Supeni setelah kemerdekaan hingga pada awal Orde Baru.
- d. *Historiografi*, merupakan langkah terakhir dalam penelitian. Dalam kegiatan ini peneliti menyajikan hasil temuan pada tahapan *heuristik*, *kritik*, dan *interpretasi* yang dilakukan sebelumnya dengan cara menyusunnya menjadi sebuah tulisan yang jelas dalam bahasa yang mudah dimengerti dan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah serta kaidah penulisan yang baik dan benar dalam bentuk skripsi.

1.5.2 Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang digunakan penulis selama proses penelitian yaitu studi literatur, studi dokumentasi dan wawancara. Teknik tersebut digunakan

dalam upaya mengumpulkan informasi berkaitan dengan masalah penelitian yang dikaji, teknik tersebut ialah :

- a. Studi literatur, teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber berupa buku yang relevan dengan permasalahan. Berkaitan dengan ini penulis melakukan kunjungan pada berbagai perpustakaan. Termasuk mengumpulkan buku-buku sosiologi dan politik berkaitan dengan tema yang dikaji.
- b. Studi dokumentasi, teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan artikel dan arsip-arsip. Peneliti berkunjung pula pada instansi-instansi pemerintah yang memiliki arsip dengan masalah penelitian yang dikaji, seperti Arsip Nasional, Sekretariat PNI Marhaenisme, dan Sekretariat KOWANI.
- c. Wawancara, penggunaan wawancara dilakukan untuk mengumpulkan berbagai informasi perihal perjalanan kehidupan seorang Supeni dan peranannya dalam dunia politik di Indonesia, sedikitnya tulisan sejarah tentang peranan Supeni serta informasi mengenai kehidupan organisasi wanita yang dipimpin oleh Supeni.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan merupakan sebuah gambaran secara menyeluruh mengenai penelitian yang dilakukan dari tahap awal sampai pada proses penulisannya. Data atau hasil yang didapatkan melalui proses observasi, telaah pustaka, studi dokumentasi, dan wawancara selanjutnya dikumpulkan kemudian diolah menjadi sebuah laporan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bagian awal penulisan mengenai Supeni, didalamnya diuraikan latar belakang masalah penelitian yang diangkat oleh peneliti dilihat dari kesenjangan yang nampak dari sebuah realita yang ada dengan kondisi yang ideal dari masalah tersebut sehingga dengan begitu terlihat alasan mengapa persoalan penting untuk diangkat. Selain dari latar belakang masalah penelitian, pada bagian ini juga terdapat rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti, manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti

dengan dilakukannya penelitian ini, metode penelitian dan teknik pengumpulan data serta sistematika dari penulisan juga dimuat pada bab pendahuluan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Kajian Pustaka berisi mengenai penggunaan konsep atau teori serta referensi yang digunakan peneliti untuk menjelaskan berbagai permasalahan yang diangkat. *Pertama* mengenai peran-peran wanita dalam panggung sejarah Indonesia sebagai gambaran bahwa wanita sejak dahulu sudah ikut berperan aktif dalam berbagai bidang. *Kedua* mengenai pergerakan perempuan pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia, pembahasan ini sebagai gambaran kegiatan perempuan pada masa-masa sulit pasca kemerdekaan terutama kurun waktu 1945-1950. *Ketiga* berisi kajian wanita dalam historiografi Indonesia, kajian ini melihat bagaimana posisi wanita dalam literatur sejarah yang diterbitkan serta bagaimana perempuan ditampilkan dalam sejarah.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini dipaparkan metode penelitian yang digunakan peneliti dalam menelusuri berbagai data, mengumpulkan data atau heuristik yang kemudian verifikasi dimana dilakukan sebuah kritik baik kritik internal maupun kritik eksternal sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan berbagai pertimbangan. Selanjutnya dilakukan sebuah analisis kritik atau diinterpretasikan yang kemudian diolah menjadi sebuah laporan penelitian atau penulisan sejarah yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku.

BAB IV SUPENI DALAM PERJALANAN SEJARAH NASIONAL TAHUN 1945-1970

Diuraikan mengenai hasil temuan peneliti tentang permasalahan yang diangkat, data-data yang ditemukan tersebut harus melewati proses berpikir yang cermat dengan dilakukannya proses kritik internal, kemudian temuan tersebut dianalisis oleh peneliti. Penjelasan yang disampaikan pada bab ini merupakan jawaban dari permasalahan penelitian yang diangkat.

BAB V KESIMPULAN

Bab terakhir ini berisikan intisari pemikiran yang diberikan peneliti terhadap keseluruhan deskripsi isi tulisan, saran-saran peneliti yang ditemukan selama proses penelitian maupun proses historiografi. Memuat juga saran dan rekomendasi dari peneliti kepada berbagai pihak yang terkait dan memiliki kepentingan terhadap hasil penelitian ini.

